



NEGARA, AGAMA DAN KEKUASAAN: PEMBACAAN KRITIS NICCOLO MACHIAVELLI DALAM KONTEKS POLITIK INDONESIA

¹Irenius Bima Abdiono

¹ Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang
jaggiornamento@gmail.com

Received 1 January 2026; Revised: 3 January 2026; Accepted: 15 January 2026; Published: 20 January 2026; Available online: January 2026

ABSTRAK

Fokus penelitian ini pada analisis terhadap hubungan antara negara, agama, dan kekuasaan dalam pandangan Niccolo Machiavelli dalam konteks politik di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan nilai agama sebagai dasar hidup bernegara. Kedudukan agama sentral sehingga kerap memengaruhi dan menentukan tatanan hidup bersama. Machiavelli mengatakan bahwa agama harus dijadikan sebagai sarana untuk membangun keteraturan sosial dan memperkuat kedaulatan negara. Machiavelli juga mengarisbawahi bahwa agama harus berada di bawah kendali negara. Tujuannya adalah supaya agama tidak berubah menjadi kekuatan yang dapat mengancam stabilitas politik dan dinamika sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode kualitatif melalui analisis sosial dan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa agama kerap dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan dan memobilisasi masa sehingga jatuh pada fanatisme, intoleransi, dan politisasi. Agama tidak lagi netral, melainkan diperalat untuk tujuan kekuasaan. Sumbangan penelitian ini pada peningkatan kesadaran supaya menjadikan agama sebagai sarana untuk membangun keteraturan sosial dan memperkuat kedaulatan negara, serta sistem politik di dalamnya. Indonesia perlu memperkuat etika publik yang kritis, rasional, dan berlandaskan pada Pancasila sehingga agama tetap menjadi sumber nilai dan moral, dan bukan sebagai instrumen yang manipulative.

Kata Kunci: Kekuasaan; Agama; Negara; Politik

ABSTRACT

This study focuses on analyzing the relationship between state, religion, and power in Niccolo Machiavelli's view in the context of politics in Indonesia. Indonesia is one of the countries that uses religious values as the basis for statehood. The central position of religion often influences and determines the order of communal life. Machiavelli said that religion should be used as a means to build social order and strengthen state sovereignty. Machiavelli also emphasized that religion must be under the control of the state. The goal is to prevent religion from becoming a force that could threaten political stability and social dynamics. The method used in this research is qualitative through social analysis and literature study. This study found that religion is often used as a means to maintain power and mobilize the masses, leading to fanaticism and intolerance. Religion is no longer neutral, but is exploited

for the purposes of power. This research contributes to raising awareness so that religion can be used as a means to build social order and strengthen the sovereignty of the state and its political system. Indonesia needs to strengthen a critical, rational public ethic based on Pancasila so that religion remains a source of values and morals, rather than a manipulative instrument.

Key Word: Power; Religion; State; Politics

PENDAHULUAN

Sejak masa kemerdekaan bangsa Indonesia telah berupaya mencari titik keseimbangan dalam menyatukan nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip kenegaraan. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila, menjadi bentuk kompromi filosofis yang menekankan pentingnya nilai religius tanpa menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara agama (Shaleh, 2019). Sila pertama ini menjadi sebuah landasan dalam berbangsa, supaya Indonesia tetap menjadi negara demokratis dan berpegang pada moralitas tertinggi (agama). Namun dalam praktiknya, realita ini tidak sejalan dengan apa yang diidealkan. Terdapat ketegangan antara logika politik kekuasaan dan moralitas religius yang akhirnya muncul ke ruang publik (Pramana et al., 2022).

Apabila ditelaah dari konteks historis, dinamika hubungan agama dan negara tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan dan warisan Kolonial (Asy’ari, 2011). Pada masa penjajahan Belanda, agama kerap dijadikan sebagai sumber kekuatan moral dan sosial

yang mempersatukan rakyat dalam melawan ketidakadilan. Namun setelah Indonesia merdeka, yakni saat negara telah menjadi sebuah pemerintahan yang berdaulat, muncul sebuah problem baru. Problemnnya adalah tentang bagaimana mengkondisikan agama dalam ruang publik tanpa mengekang atau membatasi keberagaman dan kebebasan beragama (Sadzali, 2020).

Ketegangan historis ini semakin tampak tatkala kekuasaan politik kerap menggunakan agama sebagai alat legitimasi (Marzuki Manurung & Mahiruddin Al-Aziz, 2025). Dalam banyak kesempatan, penguasa memanfaatkan simbol keagamaan tertentu untuk membentuk citra moral sehingga memperoleh dukungan masa. Contoh konkretnya adalah pemilihan gubernur DKI Jakarta. Di lain sisi, elite agama juga sering kali masuk ke dalam sistem politik guna mempengaruhi kebijakan negara. Situasi semacam ini menimbulkan kebinggung peran, di satu sisi agama seharusnya menjadi sumber moralitas dan etika, tetapi di sisi lain agama justru terperangkap dalam praktik kekuasaan yang berlandaskan

kepentingan tertentu (Sadzali, 2020). Adanya politisasi agama di Indonesia akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilihan umum, memperjelas betapa rapuhnya batas moralitas agama dengan pragmatisme politik (Hasan, 2014).

Ketika menelaah konteks ini lebih dalam, pemikiran Niccolo Machiavelli menjadi sangat relevan. Machiavelli, seorang pemikir politik dari masa Renaisans Italia, terkenal dengan pandangannya yang realistis (Suhartini et al., 2025). Dalam pandangannya ini, Machiavelli mengatakan bahwa manusia sejati merupakan makhluk yang digerakkan oleh kepentingan diri sendiri. Menurutnya, manusia secara kodrati bersifat irrasional dan kerap dikendalikan oleh nafsu dan emosi yang tidak stabil (Intan Kusumawathi Nikara & Mimba, 2019). Atas dasar ini, Machiavelli mengemukakan bahwa seorang penguasa tidak dapat semata-mata mengandalkan ideal moral dalam mengatur suatu pemerintahan. Penguasa harus mampu memahami realitas perilaku manusia agar mampu mempertahankan negara dan stabilitas kekuasaan di dalamnya.

Dalam hubungannya dengan agama, Machiavelli tidak menolaknya. Namun demikian, ia tetap mengkritisi agama dari segi fungsional. Menurutnya agama harus dijadikan sebagai sarana untuk membangun keteraturan sosial dan memperkokoh

kedaulatan negara (Suhartini et al., 2025). Agama memiliki nilai politis yang bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menumbuhkan semangat patriotisme dan solidaritas. Namun demikian, Machiavelli juga mengarisbawahi bahwa agama harus berada di bawah kendali negara (Aprianto, 2013). Tujuannya adalah supaya agama tidak berubah menjadi kekuatan yang dapat mengancam stabilitas politik dan dinamika sosial.

Machiavelli berpendapat bahwa politik tidak bisa dijalankan hanya dengan idealisme moral. Namun demikian, ia juga menekankan bahwa politik juga tidak boleh sepenuhnya terpisah dari moralitas. Dalam hal ini, negara harus mampu membuat jarak dari dominasi agama supaya tidak terperangkap dalam fanatisme agama dan sikap intoleran (Herianto & Wijanarko, 2024). Pada tahap inilah dibutuhkan keseimbangan antara nilai-nilai politik dan nilai-nilai agama. Secara konkret Indonesia sebagai sebuah negara yang beragama akan agama dan budaya membutuh sebuah cara pandang yang kritis, yakni menghidupi sistem politik yang realistis tanpa kehilangan moralitas dan etika publik. Pada tahap ini, pemikiran Machiavelli menjadi rambu-rambu guna mencegah monopoli agama tertentu dalam membangun sebuah kekuasaan. Karena sejatinya, kekuasaan senantiasa berpotensi jatuh dalam

manipulasi agama apabila tidak didasarkan pada kesadaran etis. Di lain sisi, agama yang tidak memahami realitas kekuasaan akan mudah dipropagandakan oleh paraktik politik (Syarofuzzaman, 2024).

Atas pemahaman ini, maka dalam menelaah semua ini dibutuhkan kesadaran filosofis dan refleksi kritis yang mampu memahami bahwa negara dan agama mempunyai fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Agama menjadi arah moral bagi kehidupan publik, sedangkan negara menyediakan struktur rasional untuk menjaga keteraturan tatanan sosial. Melalui analisis kritis terhadap pemikiran Machiavelli, bangsa Indonesia dapat belajar menyelaraskan kedua fakta ini, yakni membangun sistem kekuasaan yang efektif, namun tetap berlandaskan etika, serta menjaga agama supaya menjadi sumber moralitas publik, bukan sebagai alat dominasi politik.

Dalam penulisan ini, penulisan menggunakan beberapa literatur terdahulu, seperti Atthahar mengenai "Perspektif Ideologi Dan Kekuasaan Dalam Pemikiran Machiavelli", Hasan mengenai Agama dan kekuasaan politik negara, dan Herianto & Wijanarko tentang "Kuasa Agama dalam Ruang Politik Indonesia Ditinjau dari Konsep Relasi Negara-Agama Machiavelli". Kebaruan ilmiah yang ditawarkan penulis adalah harus ada korelasi yang kuat

antara negara, agama, dan kekuasaan. Negara tetap menjadikan agama sebagai moralitas tertinggi kehidupan bersama, dan menjamin agama tidak dijadikan sebagai alat politisasi dan monopoli dalam mencapai kekuasaan atau jabatan dalam ranah politik.

PEMBAHASAN

Biografi Singkat Niccolo Machiavelli

Machiavelli lahir pada tahun 1469 di Florence, Italia. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Bernardo Machiavelli dan Bartolomea de' Nerli (Aprianto, 2013). Keluarga Machiavelli merupakan bagian dari keluarga kelas menengah-tingkat dari Oltrarno, sebuah distrik di Florence. Saat masih kecil, Machiavelli sudah dihadapkan dengan kondisi sosio-politis yang rumit. Saat itu, situasi Italia mengalami instabilitas di bidang sosio-politis. Dimana Italia terpisah menjadi lima negara utama (Bangsawan Milan, Republik Venesia, Republik Florence, Negara Kepausan, dan Kerajaan Naples), serta beberapa kota merdeka atau setengah merdeka, seperti Genoa, Lucca, Bologna, Ferrara, dan Siena (Aprianto, 2013). Ia juga menjadi saksi mata terkait perubahan kekuasaan di Florence dengan munculnya sosok pemimpin yang kharismatik, seorang rahib Dominikan, yakni Giralamo

Savanorola (Syarofuzzaman, 2024).

Corak pemikiran Machiavelli, khususnya berkaitan dengan kekuasaan atau politik adalah realis (Muhammad & Hambali, 2021). Dalam bukunya, *The Principe*, Machiavelli mengatakan bahwa kekuasaan tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, moralitas ataupun agama. Baginya kekuasaan adalah tujuan. Kekuasaan harus diperoleh, digunakan dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri. (Aprianto, 2013). Kekuasaan bukanlah cara untuk meraih hal-hal lain, tetapi kekuasaan adalah inti dari apa yang diperbuat oleh seorang penguasa atau yang ingin berkuasa (Atthahara, 2020). Disamping itu, Machiavelli melihat agama sebagai pembentuk moral. Namun demikian, ia tetap menolak penggunaan agama sebagai alat untuk menutupi kelemahan politik atau melanggengkan kekuasaan.

Dalam pandangan konvensional, Machiavelli dikenal sebagai pengagas Machiavellianisme, yakni sebuah teori yang menghalalkan segala cara (membuang moral dari berpolitik) dalam melanggengkan sebuah keinginan atau tujuan. Menurut Muhammad dan Hambali, pemikiran demikian amat keliru, sebab orang kerap tidak masuk ke dalam konteks pemikiran ini ditulis (Muhammad

& Hambali, 2021). Menurut Aprianto, *The Prince* ditulis sebagai bentuk anjuran bagi pemimpin dalam suatu konteks sejarah yang spesifik, yakni sebuah negara republik yang sedang berada dalam ambang kejatuhan akibat bermacam rongrongan, seperti ancaman penjajahan dari Bangsa Spanyol, Perancis, Invansi kaum Barbar, intrinsik dalam kekuasaan Gereja, kebusukan kekuasaan para bangsawan dan korupsi yang merajarela (Aprianto, 2013).

Agama dalam Pandangan Machiavelli

Dalam pandangannya, Machiavelli mengatakan bahwa agama bukan sekadar mengenai urusan spiritual individu, tetapi juga menyangkut instrumen politik yang mempunyai fungsi sosial dalam kehidupan bernegara (Gunawan, 2017). Secara definitif, Machiavelli melihat agama melalui lensa utilitarian, yakni sejauh mana agama menumbuhkan ketertiban, ketaatan dan solidaritas, dalam kerangka “bernilai” bagi stabilitas politik (Herianto & Wijanarko, 2024). Pandangan Machiavelli ini tentunya bertolak belakang apabila berkaca dari makna teologi, dimana agama menempatkan kewajiban moral sebagai tujuan utama sebuah agama ter. Kendati demikian, sebenarnya Machiavelli tidak menolak nilai moral agama, namun ia hanya meletakkannya sebagai subordinat terhadap

kepentingan publik dan kelangsungan negara (Kamuri, 2019).

Secara teoritis, Machiavelli menjabarkan dua peran utama agama (Aprianto, 2013). Pertama, agama sebagai sumber legitimasi dan sebagai alat pengendali sosial. Legitimasi dalam konteks ini merujuk pada pemahaman bahwa agama memberi sebuah makna yang mendukung kekuasaan politik. Agama hadir sebagai sebuah kekuatan yang dapat menyatukan. Disamping itu, dalam konteks sosial, agama bekerja melalui kekuatan, kebiasaan, ketakutan, harapan dan ritual yang membentuk cara pandang hidup bersama. Kedua disiposisi ini dapat berada dalam dua ranah yang sama sekali berbeda. Apabila dimanfaatkan secara positif, agama dapat mempertahankan stabilitas politik. Sebaliknya, jika disalahgunakan demi kepentingan pribadi, agama dapat dimobilisasi bahkan dipolitiasi untuk tujuan kekuasaan dalam sistem politik. Dalam konteks ini, Machiavelli menyadari akan ambivalensi ini, dan menyarankan untuk berhati-hati dalam memaknai agama. Machiavelli berpendapat bahwa agama harus dipertahankan sebagai sebuah fasilitas publik, dan bukan berdiri sendiri sebagai institusi otonom yang bebas dari kontrol negara (Herianto & Wijanarko, 2024). Dan apabila agama menjadi sebuah ancaman,

negara berhak mengarahkan agama.

Berpijak pada realita ini, pandangan Machiavelli mengenai agama menantang idealisme moral tradisional, tetapi tidak mengesampingkan tuntutan etika (Aprianto, 2013). Ia tetap menempatkan etika melalui sistem pendidikan, kebiasaan, maupun tata cara ibadah. Melalui sistem ini, agama berdiri sebagai pendidik dan dasar moral publik, bukan sebagai hakim pribadi atas hati nurani warga negara. Dalam praktiknya, pendekatan ini dimungkinkan untuk digunakan, jika negara sendiri bertindak transparan dalam mengarahkan fungsi keagamaan. Namun jika tidak, agama berpotensi memperkuat elit politik dan melemahkan kontrol demokratis.

Atas penjelasan ini, agama dengan demikian tidak mempunyai pengaruh yang lebih besar dari negara. Ia hanya memiliki peran sejauh menjamin terciptanya suatu negara yang bebas dari segala hal yang memecah belah dan mengancam kebersatuannya. Pespektif ini dengan sendirinya mengarahkan para penguasa untuk "mempolitisasi" agama dalam merealisasikan tujuan politik (Hasan, 2014). Machiavelli sendiri mengemukakan bahwa dia tidak melihat ajaran-ajaran moral dan dogma-dogma agama, sebagai hal yang tidak bermakna atau tidak berdampak untuk tatanan hidup bernegara, tetapi semua yang ada

dalam agama, memiliki fungsi yang jelas, yakni untuk mempersatukan negara (Hardiman, 2004). Bagi Machiavelli agama mempunyai sisi pragmatis untuk menyatukan negara dan ia lebih menekankan makna keberadaan agama yang demikian. Pendapat Machiavelli menampilkan ciri khas pemikiran renaissance yang membawa warna baru dan keluar dari kungkungan agama, terutama Gereja, yang sangat mendominasi pada abad pertengahan (Santoso dan Sovia, 1950).

Relasi Agama-Negara

Relasi agama dan negara di Indonesia terbentuk melalui proses dan dinamika yang panjang. Dalam hal ini, jejak kolonial berpengaruh cukup besar dalam membentuk struktur sosial-politik yang bisa dirasakan saat ini. Pada era kolonial, Belanda tidak hanya menguasai sumber daya alam, tetapi juga mengatur dengan sistematis tatanan sosial berlandaskan pemisahan agama dan etnis (Wahyudi, 2024). Kebijakan politik etische dan sistem administrasi yang ketat menciptakan sebuah pola hubungan antara negara dan agama (Muid, 2023). Mereka memisahkan antara wilayah agama dan ranah politik, namun pada saat yang bersamaan tetap memanfaatkannya ketika diperlukan untuk mengendalikan masyarakat. Adanya pemisahan ini, menciptakan sebuah pemahaman bahwa agama

penting untuk membentuk identitas, namun tetap harus berada dalam ranah kontrol negara. Agama diposisikan sebagai instrumen sosial dan bukan sebagai pusat politik.

Dalam pandangan Machiavelli, proses kompromi sebagai tergambar dalam negara Indonesia dapat dimengerti sebagai strategi politik yang rasional (Suhartini et al., 2025). Machiavelli mengatakan bahwa pemimpin mesti mampu menelaah realitas dan mengambil keputusan yang menjaga stabilitas politik. Bertitik tolak dari pemikiran Machiavelli ini, para pendiri bangsa Indonesia telah melakukan hal yang serupa. Mereka mencermati bahwa apabila memaksakan negara agama atau negara sekular penuh, maka akan terjadi konflik yang besar. Atas dasar ini, Pancasila menjadi pilihan yang paling strategis untuk menjaga keharmonisan dan kesatuann. Dalam logika Machiavelli, keputusan seperti ini adalah wujud *prudenza* atau sebuah kebijaksanaan politik yang memperhitungkan kekuatan sosial, potensi konflik dan mengutamakan kepentingan stabilitas politik. Indonesia mengambil jalan tengah agar agama tetap dijunjung tinggi dan negara tetap memegang kendali struktur kekuasaannya.

Oleh para bapa bangsa, Pancasila dirumuskan sebagai fondasi filosofis yang menuntun

dan mengarah kehidupan berbangsa. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar moral yang menyatukan berbagai kelompok agama (Dewantara, 2015). Namun demikian, sila ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang teokratis. Sila tersebut justru memberi ruang baru bagi nilai religius dalam kehidupan publik, namun tidak memberikan kekuasaan langsung kepada institusi agama untuk menentukan hukum negara. Dengan keberadaan sila ini, Indonesia menjadi negara religius dan bukan negara agama. Negara mengakui secara utuh keberadaan Tuhan sebagai sumber moral publik, namun tidak menetapkan satu agama sebagai dasar hukum (Sadzali, 2020). Dalam praktiknya, posisi ini sangat penting untuk menjaga keberagaman karena Indonesia terdiri dari puluhan kepercayaan lokal dan beberapa agama besar.

Pendekatan yang dilakukan di Indonesia sejalan dengan pemikiran Machiavelli mengenai pentingnya stabilitas politik. Machiavelli melihat agama sebagai alat yang dapat memperkuat kekuasaan jika digunakan dengan bijak, dan dapat merusak bila digunakan secara berlebihan ataupun dipaksakan (Aprianto, 2013). Dalam konteks Indonesia, sila Ketuhanan Yang Maha Esa berperan sebagai sumber legitimasi moral dan kesatuan

sosial. Namun demikian, negara tetap harus memberi batasan agar agama tidak menguasai struktur kekuasaan. Sejalan dengan situasi ini, Machiavelli mengatakan bahwa kekuasaan harus dikelola dengan seimbang, antara moralitas dan kepentingan negara. Jika moralitas terlalu mendominasi, negara akan menjadi rapuh. Namun jika kekuasaan sepenuhnya tidak bermoral, negara akan jatuh pada tirani (Suhartini et al., 2025). Apabila bercermin dari kedudukan negara di Indonesia, para pendiri bangsa memahami logika yang dikemukakan oleh Machiavelli, karena mereka menepatkan agama sebagai fondasi etis, tetapi tetap memastikan bahwa struktur negara berada dibawah kendali politik dan bukan otoritas religius.

Setelah kemerdekaan, negara Indonesia membentuk sistem yang mengakomodasi agama secara formal (Marzuki Manurung & Mahiruddin Al-Aziz, 2025). Negara mengakui agama sebagai identitas penting masyarakat. Karena perhatian ini, kemudian negara mendirikan kementerian khusus, yang mengatur soal kurikulum Pendidikan agama dan memberi ruang bagi pengadilan agama (Wahyudi, 2024). Dalam konteks ini, posisi agama berada dalam kerangka hukum nasional, bukan berada di atasnya. Relasi ini menciptakan model yang unik, yang memadukan penghormatan pada nilai moral dengan prinsip

kenegaraan modern. Namun model ini juga menimbulkan ketegangan. Muncul kelompok agama tertentu yang ingin memperluas peran mereka dalam menentukan kebijakan politik. Kondisi semacam ini menurut Machiavelli wajar terjadi, karena politik merupakan arena persaingan (Aprianto, 2013).

Selanjutnya, reformasi pada tahun 1998 membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Sejalan dengan ini, agama kembali tampil kuat dalam sistem politik. Partai-partai berbasis agama bermunculan. Berbagai komunitas religius kembali aktif dikancah politik (Donald Qomaidiansyah Tunggak, 2022). Di satu sisi, kebebasan ini meningkatkan partisipasi publik, namun di sisi lain, juga membuka peluang munculnya politik identitas, dimana agama menjadi alat untuk memobilisasi massa. Ketika agama dijadikan sebagai senjata politik, perbedaan keyakinan menjadi sumber konflik. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan serius, yakni sejauh mana agama dapat digunakan dalam politik tanpa merusak persatuan bangsa. Senada dengan ini, Machiavelli memberikan cara pandang yang penting dalam masalah ini. Ia mengatakan bahwasannya pemimpin sering menggunakan simbol moral untuk membangun citra diruang publik. Penggunaan ini pada dasarnya merupakan tindakan yang sah, sejauh tidak digunakan untuk

menipu atau memecah-belah kesatuan (Atthahara, 2020).

Politik Identitas dan Instrumentalisasi Agama

Politik identitas di Indonesia, muncul sebagai akibat dari interaksi yang kompleks antara kompetisi kekuasaan, keragaman sosial dan kebutuhan elit politik untuk mendapatkan legitimasi secara cepat (Y. S. Lestari, 2018). Dalam pandangan Machiavelli, identitas menjadi instrumen efektif untuk memobilisasi masa karena menyentuh aspek emosional dan naluriah manusia. Machiavelli melihat manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh rasa takut, kepentingan dan harapan sehingga simbol seperti agama mudah dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan masa. Indonesia sebagai negara yang plural dalam aspek religius menciptakan peluang besar bagi para politisi untuk menggunakan sentimen-sentimen keagamaan sebagai alat perebutan kekuasaan (Aprianto, 2013). Adapun fenomena pilkada Jakarta pada tahun 2017, menjadi bukti yang paling konkret tentang bagaimana sentimen agama menggeser rasionalitas publik dan menutup mata setiap orang sehingga mengubah dinamika politik menjadi ruang polarisasi identitas (D. Lestari, 2017). Slogan “aksi bela Islam, 212”, menjadi simbol moral yang menutupi kepentingan politik dibelakangnya. Dalam kerangka

pikir Machiavelli, fenomena demikian menggambarkan bahwa agama dapat ditunggang untuk menciptakan loyalitas masa, sekaligus melemahkan lawan politik secara efisien dan efektif.

Selain itu, instrumenisasi agama juga semakin mudah terjadi karena agama menduduki bagian sentral dalam mengatur hidup bersama. Di Indonesia, simbol-simbol religius, dan dukungan dari tokoh religius kerap dijadikan sebagai media untuk memperoleh dukungan dalam ranah pemilu (Zainal Abidin Bagir, 2022). Banyak kadidit tampil manipulatif, yakni dengan terlihat religius, menghadiri berbagai kegiatan keagamaan, atau menggunakan narasi moral untuk membangun citra yang diruang publik. Politik seiman, kerap digaungkan ditingkat lokal, khususnya untuk memilih kadidat yang mempunyai identitas agama yang sama. Hal ini, dapat dilihat terlihat saat pemilihan kepala daerah di Aceh maupun di beberapa wilayah Indonesia bagian timur (Zainal Abidin Bagir, 2022). Dalam konteks ini, agama tidak lagi diposisikan sebagai pedoman moral, melainkan sebuah metode persuasif untuk melanggengkan kekuasaan.

Secara definitif, instrumenisasi agama juga terlihat dalam kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah yang mana tunduk pada

intervensi identitas mayoritas (Zainal Abidin Bagir, 2022). Machiavelli sendiri mengingatkan bahwa penguasa harus mampu menjaga stabilitas politik, dengan mengatur institusi sosial, termasuk agama (Muhammad & Hambali, 2021). Dalam konteks Indonesia sendiri, ditemukan banyak peraturan daerah yang lahir tidak berdasarkan kebutuhan rasional publik, melainkan karena tekanan kelompok religius yang dominan. Misalnya adalah perda-perda bernuansa syariat, pembatasan rumah ibadah bagi kaum minoritas, hingga penolakan terhadap kegiatan keagamaan oleh kelompok non-mayoritas. Berbagai kasus konkret adalah pelarangan pembangunan Gereja di Cilegon, penutupan rumah ibadah Ahmadiyah di NTB, ataupun gangguan terhadap ibadah Natal diberbagai daerah di Indonesia (Suryawati & Syaputri, 2022). Adanya fenomena intoleransi ini memperlihatkan lemahnya negara dalam menjamin keadilan dan kebebasan beragama. Hal ini juga menunjukkan bagaimana agama berubah menjadi sebuah alat kontrol sosial yang menguntungkan elit tertentu.

Dalam teorinya, Machiavelli menggarisbawahi bahwa penguasa harus cerdas membaca karakter rakyatnya dan memanfaatkan keadaan psikologis tersebut untuk mempertahankan kekuasaan (Maiwan, 2019). Sebagai sebuah negara yang

mempunyai persentasi tinggi dalam penggunaan berbagai ruang dan platform digital, karakter masyarakat di Indonesia mudah dipengaruhi oleh isu-isu moral dan narasi agama yang sengaja disebarkan oleh elite politik. Berbagai berita hoaks keagamaan, potongan video yang dipelintir dan penggunaan buzzer politik mengindikasikan bagaimana propaganda identitas (agama) tertentu bekerja dengan sangat efektif dalam sistem demokrasi digital (Zainal Abidin Bagir, 2022). Informasi-informasi yang menyentuh rasa takut mengenai ancaman agama tertentu menyebar menjadi lebih cepat dibandingkan penjelasan rasional. Dalam sistem politik Machiavelli strategi dengan memanfaatkan rasa takut publik merupakan metode yang sah bagi penguasa dalam membangun loyalitas pendukung dan melemahkan oposisi (Aprianto, 2013). Namun dalam ranah politik di Indonesia, strategi ini menciptakan sistem politik yang chaos, yang sulit dipulihkan.

Adapun dampak dari politik identitas dan instrumentalisasi agama adalah menurunnya rasa kebersamaan dan kesatuan sebagai sebuah negara utuh, sehingga terjadi fragmentasi sosial (Saputro, 2019). Machiavelli berpendapat bahwa para penguasa atau elit politik harus mampu memanfaatkan agama untuk sebagai alat stabilitas politik. Di Indonesia sendiri, politisasi agama justru

menjadi menjadi batu sandungan, yang membuat jurang antara kelompok mayoritas dan minoritas (Saputro, 2019). Peristiwa peneyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, penyerangan rumah ibadat di Singkil mempertegas bahwa kedudukan agama justru menjadi pemicu konflik horizontal yang tidak terselesaikan. Fenomena ini semakin konkret tatkala banyaknya aktor politik meraih kekuasaan dengan memainkan simbo-simbol religius, tetapi gagal menghadirkan kebijakan publik yang mengatasi korupsi, kemiskinan atau ketidakadilan struktural (Di et al., 2011). Adanya kontradiksi citra religius dan praktik kekuasaan yang koruptif mempertegas ketidakmampuan elit politik dalam menjaga kekonsistenan moral. Kondisi ini semakin membuktikan bahwa politik identitas dan instrumentalisasi agama dalam sistem politik telah melemahkan negara sebagai pelindung warga negara tanpa diskriminasi.

Implikasi Etis dan Filosofis

Dalam praktinya, perspektif yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli kerap dianggap keras, oportunitis bahkan tidak bermoral (Suhartini et al., 2025). Namun, bila ditelaah lebih dalam, Machiavelli pada dasarnya hendak menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam dunia nyata dan bukan dalam dunia ideal. Dalam situasi demikian, ia menekankan bahwa

setiap orang (pemimpin) harus memahami betul realitas manusia, dinamika konflik, dan permainan kepentingan yang selalu mengelilingi kekuasaan. Berangkat dari pemahaman ini, pembacaan kritis terhadap pandangan Machiavelli menjadi relevan bagi Indonesia karena Indonesia sendiri hidup dalam ruang politik yang kompleks, dimana praktik politik dan moralitas agama kerap bertemu namun tidak sejalan. Pada titik inilah Machiavelli membantu membuka mata bahwasannya kekuasaan membutuhkan rasionalitas, dan agama menawarkan nilai. Dalam tataran ini, keduanya sangat penting, tetapi harus berada dalam tata kelola yang tepat.

Tantangan besar bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara realitas politik dan moralitas agama (Suryawati & Syaputri, 2022). Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang sangat religius sehingga nilai-nilai moral menduduki posisi yang vital dalam kehidupan publik. Disamping fakta ini, politik Indonesia tetap diwarnai dengan pertarungan kepentingan, strategi dan bebarbagi kompromi, yang membuat moral agama tidak seutuh berjalan dalam dirinya. Perlahan ia juga pudar bahkan samar karena tertutup oleh ragam kepentingan pribadi dan kelompok. Sejalan dengan fakta

ini, Machiavelli berpendapat bahwa politik tidak dapat berjalan hanya dengan niat baik. Politik membutuhkan sikap yang berani mengambil keputusan yang kadang tidak populer bahkan dilandasi dengan motivasi yang mungkin sangat tidak menguntungkan pribadi ataupun kelompok tertentu (Herianto & Wijanarko, 2024). Dalam hal ini, menciptakan keseimbangan dan keteraturan dalam politik tidak mudah, namun tetap harus diperjuangkan guna menjaga agar politik tetap manusiawi dan realistis.

Salah satu resiko besar jika politik gagal menjaga keseimbangan adalah munculnya politisasi agama. Secara definitift hal ini terlihat dalam beberapa momen politik di Indonesia, terutama ketika agama dijadikan sebagai senjata untuk memobilisasi atau menyerang oposisi tertentu (D. Lestari, 2017). Politisasi agama memecah belah masyarakat, mengaburkan nilai spiritual dan menurunkan mutu demokrasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyadari bahwa menjadi penguasa atau elit politik yang baik bukan hanya cerdas secara strategi, tetapi mampu menjaga kesucian moral agama dalam kehidupan bermasyarakat dalam keadaan apapun. Agama tidak boleh menjadi korban politik hanya untuk meraih kekuasaan.

Dalam konteks ini, Pancasila menjadi berperan sebagai jalan yang

menyeimbangkan rasionalitas kekuasaan dan nilai spiritual bangsa. Pancasila menjadi mekanisme etis yang mampu menempatkan agama sebagai sumber moral, dan bukan alat politik (Sadzali, 2020). Pancasila membantu Indonesia menghindari dua ekstrem, yakni negara teokratis yang seutuhnya tunduk pada otoritas agama maupun negara secular yang benar-benar menyingkirkan nilai-nilai moral. Pancasila menjadi idea yang lebih seimbang, dimana kekuasaan tetap rasional, namun tidak kehilangan dimensi etis di dalamnya (Singgih, 2022).

Pada akhirnya yang dibutuhkan Indonesia adalah membangun budaya politik yang matang, kritis, dan bertanggungjawab. Politik di Indonesia perlu menciptakan pemimpin-pemimpin yang mampu berpikir strategis, dan tetap setia pada nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Disamping itu, masyarakat juga harus bijak dalam menilai tindakan politik supaya tidak jatuh dan terjebak pada retorika agama maupun permainan identitas. Indonesia mempunyai ideologis yang kuat, yang bersumber dari Pancasila (Zainal Abidin Bagir, 2022). Namun demikian hal ini tentu tidak cukup, sebab fondasi ini harus ditopang oleh pendidikan politik, praktik pemerintahan yang etis dan kesadaran publik serius. Dengan demikian, Indonesia dapat mengembangkan tatanan negara yang baik dengan

sistem politik yang rasional, bermoral, beragama, berorientasi pada kebaikan bersama, dan bukan pada kerakusan akan kekuasaan dan jabatan.

PENUTUP

Pemikiran Machiavelli membantu setiap orang untuk melihat kekuasaan secara lebih realistis, bahwasanya agama dan politik berada dalam kohesi, namun mempunyai fungsi yang berbeda dan tidak boleh disatukan secara semena-mena. Machiavelli menegaskan bahwa politik membutuhkan strategi, perhitungan dan kemampuan membaca kepentingan publik. Dalam situasi ini, agama dapat menjadi dasar moral yang dapat menjaga kekuasaan agar tidak menyimpang. Adanya keterlibatan nilai-nilai religius dalam ruang publik tidak menjadi masalah selagi tidak dijadikan sebagai alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Secara definitif, gagasan ini relevan untuk mengkritik praktik politisasi dan instrumentalisasi agama yang kerap muncul dalam pemilu maupun dalam wacana politik harian. Politisasi dan instrumentalisasi agama tidak hanya mengaburkan makna spiritual agama, tetapi juga mencederai rasionalitas publik dan mengganggu kesatuan sosial. Dalam hal ini, Indonesia perlu memperkuat etika publik yang kritis, rasional, dan berlandaskan pada Pancasila sehingga agama tetap menjadi sumber nilai dan

moral, dan bukan sebagai instrument yang manipulatif. Kesadaran ini membantu Indonesia untuk membangun negara dengan kehidupan politik yang matang, serta lebih berorientasi pada kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, H. (2013). Niccolo Machiavelli Il Principe. Jogjakarta: Palapa.
- Asy'ari, H. (2011). Relasi negara dan agama di indonesia. RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1-7.
- Atthahara, H. (2020). Perspektif Ideologi Dan Kekuasaan Dalam Pemikiran Machiavelli: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden 2019. Jurnal JISIPO, 4(1), 85-100.
- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. Jurnal Ilmiah CIVIS, V (1), 640-653.
- Di, W., Otonomi, E. R. A., & Lombok, D. (2011). Politik, agama dan kontestasi kekuasaan nahdlatul wathan di era otonomi daerah lombok, ntb. 01, 114-116.
- Donald Qomaidiansyah Tungkag. (2022). Desakralisasi Partai Politik Islam Pada Awal Reformasi Di Indonesia. Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah, 8(1), 47-59.
- Gunawan, E. (2017). Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam. KURIOSITAS, 11(2), 105-125.
- Hasan, N. (2014). Agama dan kekuasaan politik negara. KARSA, 22(2), 261-271.
- Herianto, H., & Wijanarko, R. (2024). Kuasa Agama dalam Ruang Politik Indonesia Ditinjau dari Konsep Relasi Negara-Agama Machiavelli. Jurnal Filsafat Indonesia, 7(1), 44-53.
- Intan Kusumawathi Nikara, I. A. G., & Mimba, N. P. S. H. (2019). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Idealisme dan Religiusitas pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 01, 536. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p20>
- Kamuri, J. P. (2019). Yesus Dan Machiavelli: Moralitas, Religiusitas, Dan Kompetensi Politisi Di Ruang Publik. Societas Dei, 6(2), 169-191.
- Lestari, D. (2017). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia. SIMULACRA, 2(1), 31-37.
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan

- Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19–30.
- Maiwan, M. (2019). Antara Virtue Dan Fortune: Suatu Dimensi Dalam Pemikiran Machiavelli. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(1), 39–61.
- Marzuki Manurung, A. A., & Mahiruddin Al-Aziz, I. P. L. (2025). Negara, Agama, dan Warga Negara. *JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies)*, 5(2), 491–510.
- Muhammad, N. A., & Hambali, R. Y. A. (2021). Kejujuran Dan Etika Dalam Konsep Politik Machiavelli. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.115>
- Muid, A. (2023). Pendidikan Agama Islam Pada Masa Kolonialisme Belanda Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam*, 13(13), 40–46.
- Pramana, J., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2022). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1321>
- Sadzali, A. (2020). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 341–375. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>
- Saputro, A. (2019). Agama dan negara: politik identitas menuju pilpres 2019. *Asketik*, 2(2), 111–120.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 237–249.
- Santoso, Y dan Sovia, V.P (Penerjemah). (1950). *The Discourses. The Modern Library: London.*
- Singgih, E. G. (2022). Moderasi Beragama Sebagai Hidup yang Baik. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 7(2), 191. <https://doi.org/10.21460/ge.ma.2022.72.911>
- Suhartini, S. P., Anggraeni, P., & Rahmadani, A. (2025). Machiavelli Dan Kekuasaan Negara Republik Demokrasi: Perspektif Kepemimpinan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.11111/Da ssollen.xxxxxxx>
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara.

- Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 433–446.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>
- Syarofuzzaman, A. (2024). Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 22–29.
<https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.11833>
- Wahyudi, A. T. (2024). Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 2(2), 286–304.
- Zainal Abidin Bagir, J. M. I. S. (2022). Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis. Gramedia.